

Pendidikan Islam dan Kebangkitan Kaum Cendekiawan Muslim Indonesia

Muhammad Ali¹, AA Andari²

^{1,2}Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

¹mr.ali.mc@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Islam memiliki sejarah panjang di Indonesia, dengan berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Cendekiawan Muslim memiliki peran penting dalam menjaga ajaran Islam dan membangun masyarakat yang kuat. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) didirikan pada tahun 1990 untuk menyatukan dan memberdayakan umat Islam. Penelitian pustaka dengan analisis isi digunakan sebagai metode untuk menganalisis literatur tentang sejarah ICMI dan peran cendekiawan Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ICMI telah berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan peran akademisi Muslim di Indonesia. Latar belakang lahirnya ICMI termasuk ketidakpuasan rakyat Islam terhadap kebijakan Orde Baru, keinginan rakyat untuk kembali berpartisipasi dalam politik nasional, dan perbedaan pendapat antara cendekiawan Muslim tentang pembaharuan pemikiran keagamaan. ICMI menawarkan tempat bagi cendekiawan Muslim untuk berkumpul dan bertukar ide, memberi mereka akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran cendekiawan Muslim, dan mendorong mereka untuk membantu pembangunan bangsa. Dari sejarah pendirian ICMI, dapat diambil pelajaran betapa pentingnya cendekiawan Muslim untuk membangun bangsa, bekerja sama dengan pemerintah, menjaga organisasi dari intervensi politik, dan terus membaharui pemikiran keagamaan Islam.

Kata Kunci: Cendekiawan Muslim, ICMI

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu wahana penyebarluasan ilmu pengetahuan. Allah Swt berfirman melalui ayat 11 QS Al-Mujadilah artinya "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Firman tersebut menjelaskan tentang kedudukan tinggi orang berilmu dalam Islam, yang mana ini juga menegaskan betapa pentingnya pendidikan. Nabi Muhammad Saw bersabda, "Menuntut ilmu adakah kewajiban setiap muslim." (HR. Ibnu Majah). Hadist ini semakin menegaskan kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Pendidikan mengenai keislaman sendiri telah mengalami perkembangan yang pesat sejak munculnya Agama Islam yang disebarkan Nabi Muhammad SAW sampai era modern ini. Perkembangan tersebut mencakup metode, ilmu, dan lembaga pendidikan Islam yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Indonesia melihat fenomena ini dengan tercermin pada cepatnya berkembang pendidikan Islam (Hambali & Mu'alimin, 2020).

Di Indonesia, pendidikan Islam telah mengalami perkembangan pesat sejak berabad-abad lalu. Berbagai lembaga pendidikan Islam didirikan, mulai dari pesantren hingga perguruan tinggi. Perkembangan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode klasik, periode klonial dan periode kemerdekaan (Nasution, 2020).

Periode Klasik (Abad ke-7 hingga ke-16), pada periode ini pendidikan Islam berpusat pada masjid dan surau. Materi pembelajarannya meliputi ilmu-ilmu agama seperti tauhid, fikih, dan tasawuf. Islam berkembang dengan corak Sufistik, memberikan pengaruh signifikan pada pemikir-pemikir Islam selama hampir empat abad. Periode Kolonial (Abad ke-17 hingga ke-20), pada periode ini hubungan antara terpelajar Indonesia dan Timur Tengah pada abad membawa ide-ide pembaharuan pemikiran Islam, tetapi pemikiran sufistik masih tetap kuat serta muncul berbagai lembaga pendidikan Islam modern seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selain ilmu-ilmu agama, lembaga-lembaga ini juga mengajarkan ilmu-ilmu umum. Periode Kemerdekaan (Abad ke-20 hingga sekarang), pada periode ini pendidikan Islam semakin berkembang dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi Islam (Ridwan & Rozaki, 2015).

Sebagai perpanjangan tangan lembaga pendidikan tinggi keagamaan yang sudah berkembang sebelumnya, pemerintah secara resmi mendirikan IAIN di Yogyakarta dan Jakarta pada tahun 1960. Debat tentang pembaharuan pemikiran keislaman semakin marak pada tahun 1970-an. Dalam sepuluh tahun, generasi muda terpelajar Muslim menunjukkan kecenderungan yang tidak lagi normatif terhadap agama. Generasi ini membentuk keyakinan agamanya dengan pendekatan empiris dan historis, berbeda dengan masa Islam yang bercorak mistis-sufistik. Dengan perkembangannya, IAIN semakin berkontribusi pada pembentukan intelektual dan akademisi, dan ketika orde baru, terbentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (Hidayat et al., 2022). ICMI didirikan oleh sekelompok cendekiawan Muslim Indonesia. Didirikannya ICMI dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu keinginan untuk meningkatkan peran cendekiawan Muslim dalam pembangunan bangsa, keinginan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, serta keinginan untuk merespon berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam (Bahrum, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), menganalisis peran ICMI dalam membangkitkan peran cendekiawan Muslim di Indonesia, serta merumuskan pembelajaran yang dapat diambil dari sejarah lahirnya ICMI untuk pengembangan pendidikan Islam di masa depan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan pendidikan Islam, Cendekiawan Muslim, serta umat Islam secara keseluruhan.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis literatur yang tersedia di perpustakaan untuk memahami dan menyusun gambaran perkembangan cendekiawan Muslim Indonesia (Hermawan, 2019). Metode penelitian pustaka dipilih karena beberapa alasan, yaitu topik penelitian ini membutuhkan analisis mendalam terhadap literatur yang tersedia, penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data primer di lapangan, serta metode ini relatif lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan dengan metode penelitian lainnya.

Sampel penelitian ini adalah literatur yang relevan dengan topik penelitian dan memenuhi kriteria, antara lain diterbitkan oleh penerbit yang kredibel, ditulis oleh para ahli di bidang terkait, serta memiliki informasi yang akurat dan terkini (Rukin, 2019). Data dikumpulkan dengan mendapatkan informasi dari literatur yang ditemukan dari berbagai sumber, baik berupa buku maupun artikel. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, seperti buku-buku tentang sejarah Islam di Indonesia, artikel ilmiah tentang perkembangan cendekiawan Muslim Indonesia, jurnal penelitian tentang, serta pendidikan Islam di Indonesia (Mahanum, 2021). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content

analysis). Teknik ini digunakan untuk menganalisis teks dan menemukan tema, pola, dan makna yang terkandung dalam literatur yang dikaji (Sholihah, 2020).

Hasil

Pendidikan Islam dan Peranannya dalam Menjaga Ajaran Islam

Sejarah panjang pendidikan keagamaan di Indonesia melibatkan lembaga-lembaga seperti pesantren dan madrasah, yang kemudian berkembang sebagai lembaga pendidikan modern setelah interaksi dengan sistem pendidikan Belanda. Pendidikan Islam di Indonesia saat ini menghadapi tiga tantangan utama: mempertahankan hasil pembangunan pendidikan, mengantisipasi globalisasi, dan menyesuaikan diri dengan otonomi daerah (Bashori, 2017). Dalam menghadapi perubahan sosial dan kultural, pendidikan Islam perlu menyusun wacana yang relevan dengan masyarakat, baik secara filosofis maupun metodologis. Lembaga pendidikan Islam memiliki peran krusial dalam menjaga moralitas dan membangun tatanan masyarakat yang kuat di tengah arus globalisasi dan teknologi informasi (Dacholfany, 2015). Pada sejarah perkembangan dunia pendidikan Islam di Indonesia, kemunculan madrasah saat awal abad ke-20 adalah dampak dari gerakan reformasi Islam dan respon atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda.

Kebangkitan Cendekiawan Muslim

Istilah "cendekiawan" mengacu pada seseorang yang menggunakan kemampuan intelektualnya untuk bekerja, belajar, membayangkan, mengagasi, dan menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan. Salah satu tugas utama seorang cendekiawan adalah memikirkan kebenaran dan menyebarkannya tanpa memperhatikan hambatan. Tidak mungkin bagi seorang cendekiawan sejati untuk tetap netral; sebaliknya, mereka harus mendukung kebenaran dan keadilan. Cendekiawan juga berarti orang yang terus meningkatkan kemampuan berfikirnya untuk memahami sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa cendekiawan adalah seseorang yang berpikir untuk menyampaikan kebenaran dalam berbagai bidang ilmu demi keselamatan bersama. Cendekiawan muslim khususnya adalah mereka yang berfikir sesuai ajaran al-Qur'an dan hadis untuk kemaslahatan manusia (Sunarko, 2015). Penguatan hegemoni kaum santri dan penurunan dominasi kelompok abangan menandai pertengahan tahun 1980-an. Pada tanggal 6 Desember 1990, Presiden Soeharto, atau dikenal juga dengan abangan, secara simbolis menandai transformasi ini dengan meresmikan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) (Armansyah, 2017).

Perkembangan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

ICMI didirikan oleh sekelompok cendekiawan Muslim pada tahun 1990 dengan tujuan untuk menyatukan dan memberdayakan umat Islam di Indonesia. Pemimpin umat Islam sangat berharap akan kembali berpartisipasi dalam politik nasional ketika Orde Baru muncul pada tahun 1966. Namun, kekecewaan besar dialami oleh umat Islam karena cendekiawan muslim tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional karena kebijakan pemerintahan Orde Baru. Pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) kemudian menjadi strategi pemerintahan Orde Baru untuk mencari dukungan di tengah pelemahan dukungan ABRI dan perubahan politik (Ruslan, 2019).

Ketika Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dilahirkan, perubahan dalam konstalasi politik dianggap banyak pihak, meskipun Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bukan partai politik (H. Z. Mubarak, 2020). Khoiri (2014) menyebutkan bahwa penunjukan Habibie menjadi ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), seorang birokrat pemerintah (Menristek), membuat sebagian pengamat melihat ICMI lebih sebagai organisasi politik daripada

ikatan cendekiawan. Kehadiran ICMI terutama dengan Habibie sebagai ketua, dianggap memiliki jaminan bahwa organisasi ini tidak akan menjadi ancaman terhadap penguasa.

Pembahasan

Latar Belakang Lahirnya ICMI

Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, adalah periode yang ditandai oleh stabilitas politik dan kemajuan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat dampak negatif yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, khususnya umat Islam, akibat sejumlah kebijakan yang diimplementasikan (Rachmayanti, 2014). Salah satu kebijakan yang kontroversial adalah upaya sekularisasi yang dilakukan pemerintah, dengan tujuan memisahkan agama dari urusan politik. Dampak dari kebijakan ini sangat terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Alam, 2020).

Pertama-tama, kebijakan sekularisasi tercermin dalam pencabutan Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD 1945, yang sebelumnya mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber keadilan sosial. Selain itu, pemerintah juga menerapkan asas tunggal Pancasila sebagai landasan negara, yang beberapa kalangan merasa mengesampingkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembatasan kegiatan politik dan dakwah Islam serta penggunaan kurikulum pendidikan yang bersifat sekuler juga merupakan bagian dari kebijakan sekularisasi yang diimplementasikan (Syafa'at et al., 2022). Selain sekularisasi, diskriminasi terhadap umat Islam juga menjadi perhatian serius. Hal ini tercermin dari rendahnya representasi umat Islam dalam birokrasi pemerintahan, akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas, serta ketidakmerataan dalam pemberian kesempatan ekonomi. Bahkan, dalam penegakan hukum, umat Islam seringkali merasa tidak diperlakukan secara adil (Wijiharjono, 2021).

Dwifungsi ABRI, yang memberikan peran ganda kepada militer dalam politik dan pemerintahan, juga menjadi salah satu isu yang mendalam. Militer terlibat dalam berbagai bisnis dan politik, seringkali menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik, yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan dampak negatif bagi umat Islam (Cinu, 2016).

Sebelum era Orde Baru, umat Islam memiliki peran yang signifikan dalam politik nasional. Partai-partai politik Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memiliki pengaruh yang kuat dalam arena politik. Namun, di bawah kepemimpinan Soeharto, peran politik Islam mulai dibatasi dengan pembubaran partai-partai politik Islam dan penggabungannya menjadi satu entitas politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini menyebabkan umat Islam merasa kehilangan wadah untuk menyuarkan aspirasi politik mereka, dan secara tidak langsung, merasa terpinggirkan dalam politik nasional (Goncing, 2015).

Terkait dengan penurunan popularitas Orde Baru menjelang akhir dekade 1980-an, terdapat sejumlah faktor yang memainkan peran. Krisis ekonomi pada tahun 1987-1988 mengguncang fondasi ekonomi negara, sementara kritik terhadap pemerintah semakin meluas terutama terkait dengan masalah korupsi dan nepotisme. Di tengah tekanan ini, gerakan pro-demokrasi mulai muncul, menuntut reformasi politik yang lebih besar dan pemberian ruang politik yang lebih luas (Pertiwi, 2021). Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Orde Baru berusaha untuk mendapatkan dukungan politik dari berbagai kelompok, termasuk umat Islam. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan umat Islam, serta untuk mempromosikan pembaharuan pemikiran keagamaan (Majid et al., 2023).

Namun, di antara cendekiawan Muslim sendiri, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan terkait dengan pembaharuan pemikiran keagamaan. Ada kelompok modernis yang mendukung pembaharuan agar Islam bisa lebih relevan dengan perkembangan zaman,

sementara kelompok tradisional lebih cenderung untuk mempertahankan nilai-nilai dan tradisi Islam yang sudah ada. Perbedaan pandangan ini menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pendirian ICMI, yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi berbagai gagasan dan ide-ide pembaharuan dalam Islam (Damanik et al., 2023).

Firmandia (2023) juga menyebutkan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menimbulkan fenomena yang mendapat berbagai respons dan komentar. Beberapa sarjana dan pendukung Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), seperti Nakamura, Robert Hefner, Dawam Rahardjo, Arief Budiman, Kuntowijoyo, Douglas Ramage, Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan Imaduddin Abdulrahim, melihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai simbol kebangkitan politik Islam dan kesempatan bagi umat Islam untuk kembali ke pusat kekuasaan setelah lama terpinggirkan. Namun, analisis sekuler seperti Abdurrahman Wahid melihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai bentuk kooptasi Soeharto terhadap kelompok Islam yang sedang berkembang sebagai bagian dari rencana politiknya untuk pemilu 1992. Wahid memperkirakan bahwa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) akan ditinggalkan dan kehilangan kekuatan ketika Soeharto kembali menjadi presiden untuk periode berikutnya.

Sebagian orang melihat Ikatan Ulama Islam Indonesia (ICMI) sebagai alat yang digunakan untuk memajukan kepentingan politik kelompok Islam modernis radikal, termasuk posisi pemerintahan dan upaya mendirikan negara Islam. Meskipun demikian, kegagalan Soeharto pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa keyakinan sekuler ini tidak berdasar. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tetap berdiri setelah kejatuhan Soeharto, dan bahkan lebih kuat pada awal era reformasi, dengan Habibie terpilih sebagai presiden serta banyak anggotanya menjadi menteri. Hal ini mencerminkan munculnya kelas sosial baru di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, yaitu kelas Muslim menengah (Hasbullah & Rahman, 2016).

Secara keseluruhan, lahirnya ICMI tidak hanya dipengaruhi oleh ketidakpuasan umat Islam terhadap kebijakan Orde Baru, tetapi juga oleh keinginan umat Islam untuk kembali berperan dalam politik nasional, serta perbedaan pandangan di kalangan cendekiawan Muslim tentang pembaharuan pemikiran keagamaan. Hal ini mencerminkan dinamika politik dan sosial yang kompleks di Indonesia pada masa itu, serta upaya untuk menyeimbangkan kepentingan yang beragam dalam masyarakat.

Peran ICMI dalam Membangkitkan Peran Cendekiawan Muslim

ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) tidak hanya berfungsi sebagai sekadar wadah bagi para cendekiawan Muslim untuk berkumpul dan bertukar ide, tetapi juga sebagai sebuah lembaga yang aktif dalam membangun komunitas intelektual yang kuat dan dinamis di Indonesia. Berbagai kegiatan dan inisiatif yang dilakukan oleh ICMI telah membantu menggalang potensi para cendekiawan Muslim serta memperkuat peran mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia (Mukhlisin & Dewi, 2023).

Fauziah (2018) mengungkapkan dalam konteks perubahan sosial-politik, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tumbuh menjadi kekuatan yang signifikan dari kelas menengah. Banyak anggotanya terlibat dalam parlemen dan menjabat sebagai menteri. Media baru, Republika, didirikan, dan Bank Muamalat juga berdiri. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) didirikan dan aktif di antara akademisi dan pemikir muda. Kelas menengah Muslim ini dengan cepat menjadi bagian penting dari dinamika Islam di Indonesia. Dengan 1.200 delegasi dari 42.000 anggota di seluruh propinsi Indonesia dan partisipasi komunitas Islam di luar negeri, kongres kedua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jakarta menunjukkan pertumbuhan cepat dan luas organisasi kelas menengah. B.J. Habibie, Menteri Riset dan Teknologi yang dianggap sebagai favorit Soeharto, terpilih sebagai pemimpin Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Hampir setengah dari anggota kabinet, termasuk Soeharto sebagai Pelindung, turut serta dalam jajaran ketua-ketua ICMI.

Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI) menjadi simbol kembalinya kelompok Islam ke modal politik dan identitas Islam modern bagi kelas menengah di kota-kota. Lebih lanjut, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mencerminkan perubahan citra Islam menjadi sesuatu yang modern, tidak lagi dihubungkan dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Dewi Fortuna Anwar mencatat perubahan signifikan ini, di mana sekarang Islam diidentifikasi dengan citra yang lebih modern, dan orang-orang Islam tidak merasa terbelakang lagi. Dengan ICMI, Islam membentuk citra modern, memungkinkan banyak orang Islam menunjukkan identitas keislaman mereka dengan lebih percaya diri, dan munculnya fenomena psikologis keagamaan dimana pejabat pemerintah dan birokrat berlomba-lomba membuktikan identitas keislamannya (Khasanah, 2019).

Pada saat kelompok Abangan menguasai pemerintahan dan militer, segala bentuk identitas Muslim yang ditampilkan di depan umum dianggap sebagai ancaman terhadap negara dan pelanggaran terhadap Pancasila. Hubungan yang lebih baik antara Islam serta negara ditunjukkan dengan munculnya istilah seperti birokratisasi santri atau satrinisasi birokrasi. Elit, kelas menengah Muslim, dan kelompok terpelajar di Indonesia mengalami tren sosial-kultural yang signifikan sebagai akibat dari perubahan simbol budaya yang terjadi pada saat itu, di mana keterlibatan dalam diskursus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) atau keanggotaan dianggap sebagai keharusan untuk menghindari kesan ketinggalan zaman (Hasbullah & Rahman, 2016)

Zulmuqim et al. (2023) mengungkapkan keterkejutannya melihat tokoh-tokoh non-Muslim atau yang sebelumnya tidak mendukung Islam, seperti mantan Wakil Presiden Sudharmono, Ginanjar Kartasasmita, dan Jenderal Rudini serta Wakil Presiden Try Sutrisno, berpartisipasi dalam berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Selain itu, banyak aktifis dan intelektual Muslim di luar lingkaran negara, termasuk Amien Rais, KH. Ali Yafie, Sri Bintang Pamungkas, Imaduddin Abdurahim, dan beberapa pimpinan Nahdlatul Ulama, juga terlibat dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Mereka juga memainkan peran penting dalam kongres dan terpilih sebagai Ketua Dewan Pakar ICMI.

Selain itu, Djojonegoro (2016) menyebutkan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh ICMI adalah Muktamar, yang diadakan setiap lima tahun sekali. Muktamar ICMI bukan sekadar acara seremonial, tetapi menjadi forum utama bagi para cendekiawan Muslim untuk mendiskusikan berbagai isu aktual dan strategis yang dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum. Di sini, gagasan-gagasan disampaikan, solusi-solusi dibahas, dan arah serta kebijakan organisasi ditetapkan.

Selain Muktamar, ICMI juga secara rutin menyelenggarakan seminar dan workshop di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, hingga budaya. Kegiatan ini menjadi sarana bagi para cendekiawan Muslim untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mendiskusikan isu-isu penting yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan bangsa (Saepudin, 2016).

Tidak hanya itu, ICMI juga aktif dalam penerbitan jurnal ilmiah dan buku-buku yang berisi pemikiran dan gagasan para cendekiawan Muslim. Publikasi ini tidak hanya menjadi sumber informasi dan referensi bagi para akademisi dan cendekiawan, tetapi juga untuk masyarakat umum yang ingin memperdalam pemahaman tentang berbagai isu keagamaan, sosial, dan politik (Prayitno & Qodat, 2019).

Selain sebagai forum intelektual, ICMI juga berperan aktif dalam mendorong partisipasi politik umat Islam. Ini tercermin dalam keterlibatan ICMI dalam tim sukses beberapa kandidat presiden dan wakil presiden, serta dalam advokasi kebijakan yang pro-umat Islam dan bangsa Indonesia.

ICMI juga telah berhasil menempatkan sejumlah kadernya dalam posisi penting di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan (Jati, 2016).

Tidak hanya terfokus pada ranah politik, ICMI juga aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan syiar Islam, serta program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas cendekiawan Muslim. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi syariah, ICMI juga berupaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Damanik, 2016).

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuannya, ICMI memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk menyebarkan pemikiran dan gagasan cendekiawan Muslim kepada masyarakat luas. Program-program televisi dan radio yang dibawakan oleh ICMI membahas berbagai isu keagamaan, sosial, dan politik, sehingga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran cendekiawan Muslim (Munawar, 2019). Selain itu, ICMI juga aktif dalam pelestarian budaya Islam dan budaya bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan festival budaya dan seminar tentang budaya Islam. Semua kegiatan ini membantu membangun citra positif cendekiawan Muslim sebagai agen perubahan dan pembawa kemajuan dalam masyarakat (Syahputra, 2018). Secara keseluruhan, peran ICMI dalam membangkitkan peran cendekiawan Muslim di Indonesia sangatlah penting. Melalui berbagai kegiatan dan inisiatifnya, ICMI telah berhasil menjadi wadah yang memungkinkan para cendekiawan Muslim untuk berkumpul, bertukar ide, terlibat dalam politik, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Pembelajaran yang Dapat Diambil dari Sejarah Lahirnya ICMI

Pada tanggal 7 Desember 1990, di Malang, sebuah peristiwa penting terjadi yang menandai kebangkitan peran cendekiawan Muslim dalam pembangunan bangsa Indonesia. Kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tidak hanya menjadi momen bersejarah, tetapi juga memberikan banyak pembelajaran berharga yang relevan dalam konteks kekinian. Ini menegaskan bahwa cendekiawan Muslim memiliki peran penting dalam membawa perubahan positif dalam pembangunan bangsa (Thohari, 2020).

Lahirnya ICMI adalah bukti konkret bahwa cendekiawan Muslim dengan ilmu pengetahuan dan kepakarannya memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam berbagai aspek pembangunan. Mereka dapat terlibat dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, membantu membangun generasi muda yang bermoral dan berintegritas. Selain itu, mereka juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, yang pada gilirannya akan membantu memberdayakan masyarakat ekonomi lemah (Wijiharjono, 2021).

Peran cendekiawan Muslim juga sangat penting dalam menyuarakan aspirasi umat Islam dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang pro-umat Islam dan bangsa Indonesia. Kerjasama antara ICMI dan pemerintah dalam berbagai bidang menjadi landasan penting untuk menjembatani aspirasi umat Islam dengan kebijakan pemerintah, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik antara umat Islam dengan pemerintah (Haq, 2018).

Keberadaan ICMI sebagai organisasi independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu sangatlah vital. Independensi ini memastikan bahwa ICMI dapat menjaga objektivitas dan kredibilitasnya dalam menyuarakan aspirasi umat Islam, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini juga membantu mencegah organisasi dari risiko menjadi alat politik kelompok tertentu, yang dapat merusak tujuan utamanya dalam pembangunan bangsa (Syafa'at et al., 2022).

Salah satu pemicu utama lahirnya ICMI adalah adanya perbedaan pandangan di antara cendekiawan Muslim terkait pembaharuan pemikiran keagamaan Islam. Perbedaan ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran Islam dalam

konteks modern. Oleh karena itu, ICMI memiliki peran penting dalam mendorong reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman (Wahyunanto et al., 2021).

Dalam konteks ini, ICMI juga berperan dalam mendorong dialog dan kerjasama antara cendekiawan Muslim dengan berbagai pemikiran untuk membangun Islam yang moderat, toleran, dan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Ini membantu memperkuat pemahaman masyarakat tentang Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip kedamaian dan kemajuan (Rohman, 2020).

Secara keseluruhan, sejarah lahirnya ICMI memberikan banyak pembelajaran berharga tentang peran cendekiawan Muslim dalam pembangunan bangsa. Kerjasama antara cendekiawan Muslim dan pemerintah, menjaga independensi organisasi, dan pembaharuan pemikiran keagamaan merupakan kunci untuk mewujudkan peran cendekiawan Muslim yang optimal dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dengan memperkuat peran dan kontribusi mereka, cendekiawan Muslim dapat menjadi agen perubahan yang positif dan membawa dampak yang signifikan bagi kemajuan Indonesia secara keseluruhan.

Kesimpulan

ICMI telah memainkan peran penting dalam membangkitkan peran cendekiawan Muslim di Indonesia. Latar belakang lahirnya ICMI meliputi ketidakpuasan umat Islam terhadap kebijakan Orde Baru, keinginan umat Islam untuk kembali berperan dalam politik nasional, upaya Orde Baru untuk mencari dukungan politik, dan perbedaan pandangan di antara cendekiawan Muslim terkait pembaharuan pemikiran keagamaan.

ICMI berperan sebagai wadah bagi cendekiawan Muslim untuk berkumpul dan bertukar ide, memberikan akses kepada mereka untuk terlibat dalam politik dan pengambilan kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran cendekiawan Muslim, dan mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Pembelajaran dari sejarah lahirnya ICMI meliputi pentingnya peran cendekiawan Muslim dalam pembangunan bangsa, perlunya kerjasama antara mereka dan pemerintah, pentingnya menjaga independensi organisasi mereka dari campur tangan politik, dan perlunya terus menerus melakukan pembaharuan pemikiran keagamaan Islam. Oleh karena itu, kerjasama antara cendekiawan Muslim dan pemerintah, menjaga independensi organisasi, dan pembaharuan pemikiran keagamaan merupakan kunci untuk mewujudkan peran cendekiawan Muslim yang optimal dalam pembangunan bangsa.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan lebih banyak referensi agar mempunyai pandangan yang lebih luas dan mendalam.

References

- Alam, L. (2020). Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi. *Ruhama: Islamic Education Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.31869/ruhama.v3i2.2223>
- Armansyah, Y. (2017). Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern. *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 27–46.
- Bahrum, S. (2019). Kebangkitan Cendekiawan Muslim Dalam Pemikiran Dan Perpolitikan Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 6(1), 48-71. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2727>

- Bashori, B. (2017). Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.22202/mamangan.1313>
- Cinu, S. (2016). Agama, Meliterisasi Dan Konflik (Kasus Poso, Sulawesi Tengah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15(1), 1-49. <http://dx.doi.org/10.24014/af.v15i1.4007>
- Dacholfany, M. I. (2015). Reformasi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), Article 1.
- Damanik, A. S. (2016). *Fenomena Partai Keadilan*. Noura Books.
- Damanik, M. Z., Yuliani, D., Ningrum, D. A. A., & Novita, D. (2023). Modernisasi Dan Sekularisasi Pemikiran Islam Di Indonesia. *Jurnal At-Tabayyun*, 6(2), 82-93.
- Djojonegoro, W. (2016). *Sepanjang Jalan Kenangan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Fauziah, A. (2018). Aisyah Aminy: Karier politik dan pemikirannya (1987-2004) [bachelorThesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, 2018]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38063>
- Firmandia, F. Q. (2023). Politik Islam Soeharto: Studi Tentang Respon Soeharto Dalam Pendirian ICMI [Diploma, Universitas Nasional]. <http://repository.unas.ac.id/6391/>
- Goncing, N. (2015). Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 61-74. <https://doi.org/10.31947/politics.v1i1.134>
- Hambali, Muh., & Mu'alimin, M. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. IRCISOD.
- Haq, F. R. U. (2018). *Membela Islam, membela kemanusiaan*. Mizan Pustaka.
- Hasbullah, M., & Rahman, M. T. (2016). Islamisasi, politik dan transformasi pendidikan: Analisis atas Perkembangan Politik Nasional dan Manifestasinya pada Pengembangan Pesantren di Jawa Barat [Monograph]. LP2M UIN SGD Bandung. <https://etheses.uinsgd.ac.id/13100/>
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif, kuantitatif dan mixed method)*. Hidayatul Quran.
- Hidayat, M., Fuadi, M., & Alhaddad, M. R. (2022). Konstruksi Pendidikan Islam terhadap Kebangkitan Cendekiawan Muslim di Indonesia. *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.53649/taujih.v4i1.106>
- Iqbal, I. (2017). Konflik Etno-Religius' di Indonesia Kontemporer Dalam Pandangan Orde Baru. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(1), Article 1.
- Jati, W. R. (2016). Membangun partisipasi politik kelas menengah Muslim Indonesia. *Epistemé*, 11(2), 375-400. Doi: 10.21274/epis.2016.11.2.375-400
- Khasanah, L. (2019). Dampak Kebijakan Pendidikan Islam (Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia). *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33853/istighna.v2i1.8>
- Khoiri, M. (2014). Peran Icmi dalam perkembangan politik Islam Indonesia (Analisis tahun 1990-2000) [Masters, Pascasarjana UIN-SU]. <http://repository.uinsu.ac.id/2808/>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Majid, M. F. F., Muhammad, H. Z., Dinata, I., & Pratama, T. (2023). Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Nasional Indonesia. *JIMI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 63-73. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.9>
- Mubarak, H. Z. (2020). Wacana Islam Dalam Politik Praktis Di Indonesia. *Jurnal Widya Citra*, 1(2), 18-36.
- Mukhlishin, M., & Dewi, N. Y. S. (2023). Implementasi Ijtihad dan Tajdid: Upaya Muhammadiyah Membangun Peradaban Ekonomi Islam. *Studi Islam dan Muhammadiyah (SIAM)*, 1(2), 37-47.

- Munawar, B. (2019). Karya Lengkap Nurcholish Madjid, Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57485>
- Nasution, K. (2020). Historisitas dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 14(2), 66-80. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i2.36>
- Pertiwi, D. K. (2021). *Mengenal Orde Baru*. Buku Mojok.
- Prayitno, H., & Qodat, A. (2019). Konsep pemikiran fazlur rahman tentang modernisasi pendidikan islam dan relevansinya terhadap pendidikan islam di indonesia. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2(2), 30-43. <http://dx.doi.org/10.30659/jspi.v2i2.5150>
- Rachmayanti, N. (2014). Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China (Tiongkok) Pada Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013). Retrieved August, 19, 2016.
- Ridwan, N. K., & Rozaki, A. (2015). Gerakan Kultural Islam Nusantara: Vol. Vol. 1 (No. 1; Issue No. 1). Jamaah Nahdliyin Mataram (JNM) bekerjasama dengan Panitia Mukhtar NU Ke-33. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25395/>
- Rohman, D. (2020). Peran Media Cetak dalam Narasi Moderasi Islam Indonesia. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 20(1), 23-45. <https://doi.org/10.15575/anida.v20i1>
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Ruslan, F. (2019). Politik Hukum Islam Masa Orde Baru Dan Produk Perundang-Undangannya. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2347>
- Saepudin, J. (2016). Revitalisasi peran ICMI pada era Reformasi. *Harmoni*, 15(1), 189-202. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/215>
- Safa'at, M. A., SH, M., Herlindah, S. H., Kn, M., Mirdinata, A. J., SH, M., & Reka Dewantara, S. H. (2022). *Perkembangan Hukum Islam: Eksistensi, Relevansi, dan Tantangannya di Indonesia Pasca Reformasi*. Pustaka Peradaban.
- Sholihah, Q. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Universitas Brawijaya Press.
- Sunarko, A. (2015). IPTEK Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 15(1), Article 1.
- Syahputra, M. C. (2018). Pendidikan Islam Multikultural (Studi Komparasi Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Nurcholish Madjid) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Thohari, S. (2020). Menggali Akar Ideologis Integrasi Keilmuan dan Keislaman di Universitas Islam Indonesia. *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab*, 1(1), 18-40.
- Wahyunanto, E. D., Dwijayanto, A., & Wathoni, S. (2021). Gus Dur dan Civil Society: Peran KH Abdurrahman Wahid Dalam Pemberdayaan Masyarakat. In AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies (Vol. 1, pp. 1-20).
- Wijiharjono, N. (2021). Sejarah Pemikiran Politik Indonesia: Tanggapan Intelektual Muslim di Masa Orde Baru dan Pudarnya Peran ICMI pada Pasca-Reformasi (History of Indonesian Political Thought: Responses Muslim Intellectuals in the New Order and the Fading Role of ICMI in Post-Reform). *Politik Indonesia*. <https://ssrn.com/abstract=3868423>
- Zulmuqim, Z., Samad, D., & Tabrani, T. (2023). Pendidikan Islam Dan Kebangkitan Cendekiawan Muslim. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2261>